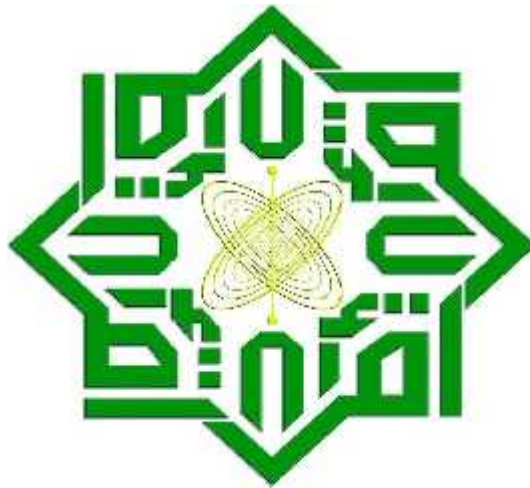


SKRIPSI

“ANALISIS FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



DI SUSUN OLEH :

MHD ASROFI
10875004175

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2012

ABSTRAK

“ANALISIS FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”

Oleh : MHD ASROFI

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berlangsung mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, untuk mendukung penelitian ini maka yang ditetapkan menjadi populasi yaitu seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 25 orang populasi, sementara yang dijadikan sampel yaitu seluruh jumlah populasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuisisioner, wawancara dan di sertai dengan dokumen yang di peroleh di Kantor Bappeda. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan indikator penelitian dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden yaitu 36.02 % menilai cukup, serta yang menilai baik yaitu 35.75 %. Namun masih ada responden yang menilai kurang baik yaitu 28.23 %, Artinya bahwa bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih terdapat kekurangan dan tidak menutup kemungkinan menemui berbagai kendala atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsinya maupun program yang dijalankan seperti masih terbatasnya data dan informasi kajian yang memberikan arah tentang perencanaan pembangunan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.3. Manfaat Penelitian	16
1.4. Sistematika Penulisan	16

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1. Perencanaan	18
2.1.1. Fungsi Perencanaan	20
2.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	24
2.1.3. Faktor Penghambat Dalam Perencanaan	26
2.1.4. Perencanaan Pembangunan Dalam Perspektif Islam	27
2.1.5. Pembangunan	30
2.1.5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	33
2.2. Hipotesis	34
2.3. Defenisi Konsep	34
2.4. Defenisi Operasional	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian.....	39
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4. Populasi dan Sampel.....	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6. Analisis Data.....	42

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.....	43
4.1.1. Letak Geografis	43
4.1.2. Keadaan Penduduk	44
4.2. Keadaan Umum BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti	46
4.2.1. Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti	47
4.2.2. Struktur Organisasi Bappeda.....	48
4.2.3. Uraian Tugas (Job Description) Bagian Unit Kerja BAPPEDA	50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden	57
5.2. Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	
Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti	58
5.2.1. Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan	
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perumusan	
Perencanaan Pembangunan.....	59

5.2.2. Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pelaksanaan Pembangunan	65
5.2.3 Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Menilai Pelaksanaan Pembangunan	71
5.2.4 Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati	78
5.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti	84
5.4. Faktor-Faktor Yang Menghambat Belum Terealisasinya Program Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti	86

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	89
6.2. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2011(km)	4
Tabel 1.3	Tabel Target dan Realisasi Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2011	13
Tabel 3.1	Jumlah Populasi dan Sampel	41
Tabel 4.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	43
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.3	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Merant....	45
Tabel 4.4	Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti	47
Tabel 5.1	Jenis Kelamin Responden.....	57
Tabel 5.2	Tingkat Pendidikan Responden	58
Tabel 5.3	Jawaban Responden Tentang Kemampuan Bappeda Dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti	60
Tabel 5.4	Jawaban Responden Tentang Kemampuan Bappeda Dalam Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	61
Tabel 5.5	Jawaban Responden Tentang Perencanaan Pembangunan Bappeda Dalam Perencanaan Tepat Waktu Di Kabupaten Kepulauan Meranti	63
Tabel 5.6	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perumusan Perencanaa Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti	64
Tabel 5.7	Jawaban Responden Tentang Koordinasi Bappeda Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti	66
Tabel 5.8	Jawaban Responden Tentang Fungsi Bappeda Dalam Konsultasi Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti	67
Tabel 5.9	Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Bappeda Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti	69

Tabel 5.10	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti	70
Tabel 5.11	Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Monitoring Bappeda Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti	72
Tabel 5.12	Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Evaluasi Bappeda Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti	74
Tabel 5.13	Jawaban Responden Tentang Perencanaan Pembangunan Bappeda Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	75
Tabel 5.14	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Menilai Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti	76
Tabel 5.15	Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengamatan Lapangan Bappeda Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti	79
Tabel 5.16	Jawaban Responden Tentang Fungsi Bappeda Dalam Memantau Persiapan dan Perkembangan Pelaksanaan Perencanaan di Kabupaten Kepulauan Meranti	80
Tabel 5.17	Jawaban Responden Tentang Fungsi Bappeda Dalam Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	81
Tabel 5.18	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi (BAPPEDA) Dalam Pelaksanaan Tugas Lain Yang di Berikan Oleh Bupati	82
Tabel 5.19	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Salah satu diantara negara-negara yang sedang berkembang adalah Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana.

Pembangunan merupakan upaya proses perubahan untuk menuju kearah yang lebih baik dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah pada intinya memerlukan keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan sektoral dengan mengusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah. Setiap daerah perlu prakarsa dan partisipasi masyarakat

dalam upaya bagi peningkatan pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, kerjasama daerah, pembangunan pedesaan dan pembangunan perkotaan.

Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka Pemerintahpun mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam Pasal 23 di tegaskan sebagai berikut : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.

Dalam hal ini BAPPEDA merupakan penanggung jawab penuh dalam pembangunan, perencanaan merupakan awal kegiatan dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan itu sendiri merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan, proses pembangunan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.

Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan

wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun dipusat.

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik, maka perencanaan pembangunan daerah harus didorong dengan implementasi pembangnaan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis. Dalam hal ini Bappeda harus konsisten dan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Sebagaimana dipaparkan diatas, maka untuk meningkatkan kualitas inplementasi pembangunan daerah di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti perlu juga di dorong dengan sumber daya manusia (SDM) yakni pegawai- pegawai yang ada pada jajaran Bappeda dalam menjalankan fungsinya,

Hal ini bersentuhan dengan hasil yang akan dicapai, karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam sebuah perencanaan pembangunan. Mengingat tanpa adanya SDM maka suatu perencanaan dan

pembangunan takkan berjalan dengan sendirinya. Hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan fisik di wilayah daerah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dirasakan belum maksimal dan merata seperti halnya dalam pembangunan jalan hingga tahun 2011 panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti 931,2 km seperti yang terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 : Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2011(km)

No	Permukaan	Panjang (km)	Persentase (%)
1	Aspal	32,2	3,57
2	Kerikil	30,6	3,39
3	Beton	249,39	27,63
4	Tanah	590,31	65,41
Jumlah		931,2	100

Sumber : Kepulauan Meranti Dalam Angka 2011.

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 590,31 km yakni 65,41 % permukaanya masih tanah, sedangkan permukaan beton sepanjang 249,39 km yakni 27,63%. Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti secara geografis merupakan wilayah kepulauan. Kondisi geografis ini memerlukan kelengkapan prasarana dan sarana penghubung yang terpadu, sehingga dapat menghubungkan wilayah kepulauan menjadi satu kesatuan.

Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam melaksanakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan daerah (Musrenbag) Kabupate Kepulauan Meranti ini memiliki dasar hukum dan tujuan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2010 ;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa pelaksanaan tugas dan perencanaan pembangunan merupakan tanggung jawab Kepala BAPPEDA. Dengan demikian tugas BAPPEDA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah,
2. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah,
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan

dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaanya, artinya Bappeda ini berfungsi membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan. Hal ini jelas di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dengan demikian Badan Perencanaa pembangunan Daerah (Bappeda) adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang baru dibentuk. Sebagai Kabupaten baru, tentu saja diperlukan dokumen perencanaan yang memberikan arah dan sekaligus pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Pada Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menyusun 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan, yakni :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
3. Master Plan Ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Meranti adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti,

sinergis dengan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dokumen perencanaan ini bersifat makro yang disusun secara sistematis memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan, yang selanjutnya akan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah kabupaten Kepulauan Meranti untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, dan proses penyusunannya perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti disusun dengan tujuan :

1. Memberikan arah dan acuan bagi Pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan jangka menengah secara partisipatif dan demokratis, sehingga mekanisme perencanaan pembangunan berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan lima tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Menyediakan suatu pedoman untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mendasarkan diri pada kondisi riil dan proyeksinya ke depan;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan dua puluh tahunan ke depan.

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam upaya mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Implementasi substansi perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang ditandai dengan terjadinya perubahan manajemen dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yakni dari manajemen Negara yang bercorak sentralistik kearah manajemen masyarakat yang bercorak desentralistik, demokratis dan otonom.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

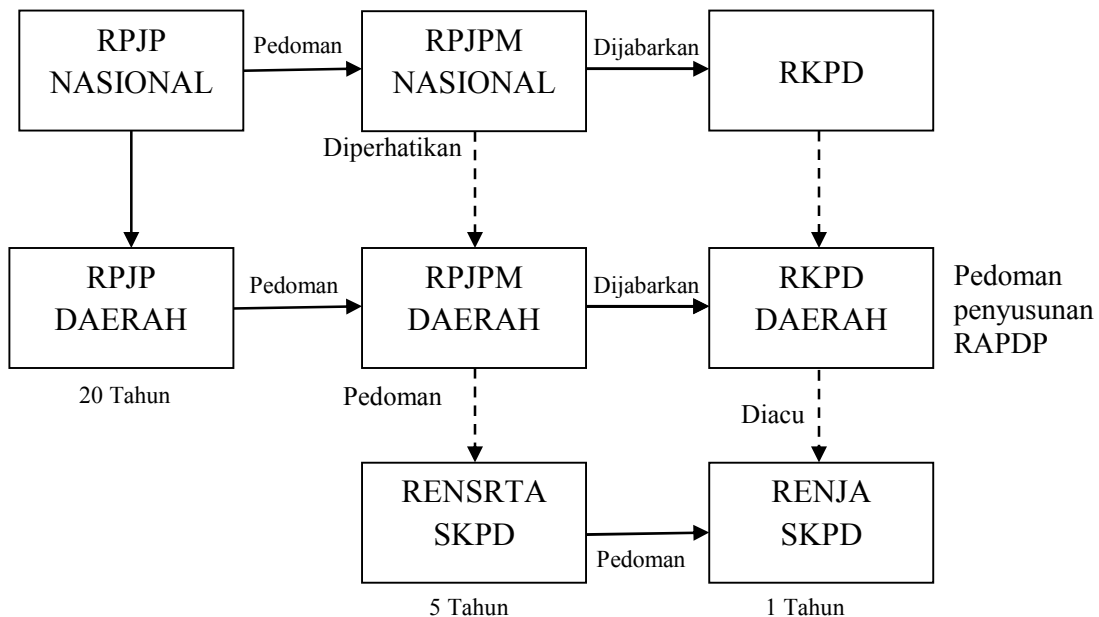
Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2014 adalah :

1. Memberikan gambaran tentang visi, misi ataupun arah kebijakan yang hendak diwujudkan, dan scenario serta agenda pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi daerah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan;
2. Menjabarkan visi, misi pembangunan dalam bentuk agenda pembangunan yang responsive terhadap perkembangan lingkungan strategis dan problematika daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti selama periode jangka menengah;
3. Tersedianya tolok ukur yang jelas bagi penilaian Kinerja Kepala Daerah (Bupati) pada masa akhir jabatannya tahun 2011 mendatang. (***RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011***)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan

perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Demikian Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 : Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004



Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia, No. 25 Tahun 2004

RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara

(PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Berkaitan dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Kepulauan Meranti pada kenyataannya masih di temukan beberapa gejala diantaranya masih banyaknya program dan kegiatan SKPD yang belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari Tabel target dan realisasi Program dan Kegiatan SKPD dibawah ini :

Tabel 1.3 Tabel Target dan Realisasi Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2011.

No	Program dan kegiatan	Target	Terealisasi	Tidak Terealisasi
1	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasaran Daerah : Kajian potensi dan strategi pengembangan sagu	100 %	-	100 %
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	-
3	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumbe Daya Alam 1. study kelayakan pembangunan jembatan (Plelantai-Teluk Ketapang)	100 %	-	100 %
	2. Study kelayakan pembangunan jembatan (Sei Air Mabuk-Butong)	100 %	-	100 %
4	Program Perencanaan pembangunan Ekonomi 1. Menyusun indicator ekonomi daerah.	100 %	100 %	-
	2. Perencanaan Penyusunan Sistem Informasi Geografis Untuk updating penggunaan lahan	100 %	-	100 %
5	Program peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 1. Penyusunan RKPD.	100 %	100 %	-
	2. Hunting data rencana kegiatan	100 %	-	100 %

Sumber : Data Skunder Kantor BAPPEDA Tahun 2012

Jika dilihat dari Tabel 1.3 diatas, pelaksanaan program dan kegiatan SKPD masih banyak yang tidak terealisasi sesuai dengan target. dimana kita dapat melihat dalam melaksanakan Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah dalam Kajian potensi dan strategi pengembangan sagu di Kab. Kep. Meranti

tidak terealisasi 100 % kerana belum terwujudnya informasi kajian potensi dan strategi pengembangan sagu. Kemudian dalam Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam dalam kegiatan study kelayakan pembangunan jembatan (Plelantai-Teluk Ketapang) dan Study kelayakan pembangunan jembatan (Sei Air Mabuk-Butong) tidak terealisasi 100 %, hal ini disebabkan belum tersedianya kajian yang memberikan arahan tentang pembangunan jembatan.

Program Perencanaan pembangunan Ekonomi dalam kegiatan Perencanaan Penyusunan Sistem Informasi Geografis Untuk updating penggunaan lahan tidak terealisasi 100 % karena belum tersedianya dokumen perencanaan sistem informasi geografis untuk updating penggunaan lahan, dan Program peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dalam kegiatan Hunting data rencana kegiatan tidak terealisasi 100 % kerana belum tersedianya data hasil survey sebagai dokumen perencanaan pembangunan.

Selain permasalahan diatas, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 seharusnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki RPJMD dan pada saat ini sedang dalam proses penyusunan, hal ini tercantum dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011. Seharusnya RPJMD tersebut merupakan patokan perencanaan pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Melihat begitu pentingnya peranan Bappeda tersebut sebagai badan yang turut

aktif membantu Bupati dalam Perencanaan Pembangunan daerah, maka timbul permasalahan, Bagaimana fungsi BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merencanakan pembangunan fisik di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik sekali untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul penelitian: ***“Analisis Fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti”***.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat belum terealisasinya program BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi BAPPEDA dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat belum terealisasinya program dan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang terutama dalam ilmu administrasi negara
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuatan kebijakan (pemerintah) maupun pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Secara akademis, sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam VI (enam) bab dan pada setiap babnya akan dirinci dalam beberapa sub bab dengan penjelasan :

BAB I : Dalam bab ini memaparkan dasar-dasar pokok pemikiran landasan penelitian yaitu terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan menjelaskan tentang uraian teoritis terhadap pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, hipotesis dan variable penelitian

- BAB III :** Menjelaskan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.
- BAB IV :** Dalam bab ini mendeskripsikan kondisi umum Kabupaten Kepulauan Meranti, serta struktur organisasinya.
- BAB V :** Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian tentang fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta upaya-upaya yang dilakukan BAPPEDA dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan fungsinya.
- BAB VI :** Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka, dan Lampiran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Perencanaan

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Secara utuh perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan (untuk masa depan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005 : 27)

Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005 : 3), perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Defenisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang (what is) dengan bagaimana seharusnya (what should be) yang bertalian

dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber. (Uno, 2006 :1)

Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kemudian menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Dari beberapa pemaparan pendapat diatas dapat uraikan bahwa perencanaan yaitu serangkaian keputusan dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang menjadi suatu pedoman untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan sumber daya tersedia. Jadi sebuah perencanaan tergantung perencanaan apa yang dibuat, apakah jangka panjang, menengah ataupun hanya jangka pendek.

2.1.1 Fungsi Perencanaan

Menurut kamus bahas Indonesia kata fungsi yang mempunyai arti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, jika ketua tidak ada, wakil ketua melakukannya.

Jadi fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga berdasarkan jabatan atau kedudukan. Berdasarkan uraian di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam organisasi berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.

Definisi diatas mengemukakan, bahwa fungsi organisasi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi itu sendiri. Fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Menurut Siagian (2002:36) mengemukakan fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai Pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang.

Menurut Handoko, (2003: 23) ada dua fungsi perencanaan :

1. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan
2. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Untuk merumuskan sebuah perencanaan pembangunan harus ditentukan langkah-langkah tertentu guna penetapan perencanaan yang baik, yaitu :

1. Identifikasi masalah
2. Analisis situasi
3. Merumuskan yang hendak dicapai
4. Menyusun garis besar semacam proposal
5. Membicarakan proposal yang telah disusun
6. Menetapkan komponen
7. Penentuan tanggungjawab masing-masing komponen
8. Menentukan outline
9. Mengadakan kontak antar unit
10. Pengumpulan data terkait
11. Pengolahan data
12. Penyimpulan data
13. Pendiskusian rencana sesuai data
14. Penyusunan naskah pinal
15. Evaluasi naskah rencana
16. Persetujuan naskah rencana
17. Penjabaran untuk pelaksana. (Prajudi dalam Syafie, 2007; 50)

Jadi dalam sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus direncanakan terlebih dulu karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan. Dengan adanya

sebuah perencanaan sebuah kegiatan akan berjalan secara struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sedangkan menurut Siagian (2003: 90-91) proses perencanaan dapat ditinjau dari ciri-ciri suatu rencana yang baik, yakni :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tehnik-tehnik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.
7. Rencana harus luas.
8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan.
9. Rencana harus bersifat praktis.

Rencana harus merupakan forecasting, mengatur rencana akan dijalankan dimasa yang akan datang, maka rencana itu merupakan peramalan atas keadaan yang kemungkinan akan dihadapi. Jadi seandainya kemungkinan dalam perencanaan itu benar-benar terjadi, kita bisa mempertimbangkan bagaimana untuk mencari atau mempertimbangkan sebuah solusinya.

Untuk mencapai suatu rencana pembangunan yang komprehensif, maka terbagilah beberapa pokok sub usaha atau kegiatan perencanaan untuk dapat sampai kepada suatu rencana komprehensif yaitu:

1. Analisa keadaan saat ini
2. Penentuan; proyeksi, tujuan, strategi dan sasaran
3. Perumusan ; program dan proyek

4. Penjadwalan tindakan; analisis jaringan kerja
5. Realitas saat ini
6. Citra masa depan
7. Tindakan yang diperlukan
8. Skenario bagi usaha pembangunan
9. Perumusan rencana
10. Implementasi terhadap rencana
11. Proses perencanaan
12. Proses pembangunan.

Jadi sebuah rencana itu sangat penting sekali dalam sebuah pembangunan karena merupakan sebuah keterampilan penting untuk suatu keberhasilan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dalam sebuah perencanaan waktu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perencanaan, dimana terdapat tiga hal penting dalam penggunaan waktu :

1. Waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif,
2. Waktu sering diperlukan untuk melaksanakan perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variable dan alternative, karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan memperhitungkan semua kemungkinan,
3. Jumlah waktu yang akan dicakupkan dalam rencana harus di pertimbangkan.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis-jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan

untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (UU NO. 25 Tahun 2004, pasal 1)

2.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. dengan melihat secara divergensi dari setiap unsure tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan membentuk suatu pengertian yang utuh.

Menurut Riyadi dan Deddy (2005 : 7) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Randy R. Whiratnolo, Riant Nugroho D, 2006 : 41), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsure ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisiten dan serasi, seperti kebijakan fisikal, moneter, anggaran, harga, sektirial dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industry, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan kerana hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsur-unsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah kerana akanberhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan kompreherensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Maka untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat dibutuhkan sekali pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi menejemen yang saling terkait. Monitoring dalam prekteknya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian, atau

pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan.

Menurut Siagian dalam Riyadi (2005 : 263) Pengawasan ialah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan evaluasi didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai, dan tujuan pengawasan implementasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk :

1. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Mengetahui apakah unit-unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya dan perannya masing-masing.
3. Mengetahui apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh setiap unit atau instansi atau para pelaksana proyek dengan pihak-pihak terkait.
4. Mencegah dan mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dihindari.

2.1.3 Faktor Penghambat Dalam Perencanaan

Dalam perumusan perencanaan pembangunan, Menurut Todaro, (2000:67) bahwa kegagalan proses perencanaan diakibatkan oleh beberapa masalah khusus tertentu, yaitu :

1. Keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya.
2. Data-data yang tidak memadai dan tidak handal.
3. Goyolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
4. Kelemahan kelembagaan.
5. Kurangnya kemauan politik.

Sedangkan Menurut Riyadi dan Deddy (2005 : 349) Beberapa hal yang sering menjadi kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Keadan politis merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan yang mendompleng pada substansi perencanaan pembangunan.
2. Kondisi Sosio Ekonomi, biasanya mencerminkan kemampuan financial daerah. karena kemampuan financial memiliki peran penting untuk dapat merumuskan perencanaan yang baik.
3. Budaya atau Kultur yang dianut oleh masyarakat. Apabila kultur ini tidak diberdayakan dan diarahkan kearah yang positif secara optimal akan sangat mempengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai tahap implementasinya

2.1.4 Perencanaan Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian Islam, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai sebuah perancaan dalam kehidupan kita sehari. Sebungan dengan hal ini sebagaimana dalam firman Allah S.W.T :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu

kerjakan.” (Al-Hasyr:18).

Dari penjelasan ayat diatas, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, dimana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Di samping itu *kata perhatikanlan* mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Sesungguhnya tanpa kita sadari, dalam diri kita sendiri. Allah S.W.T telah menciptakan kita juga melalui sebuah perencanna. Sebagaiman dalam firman Allah S.W.T :

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

Artinya:

Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan). (Al-Insyiqaaq : 19)

Yang dimaksud dengan tingkat demi tingkat ialah dari setetes air mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja dan sampai dewasa. Dari hidup menjadi mati kemudian dibangkitkan kembali. Dan Allah-lah maha sempurna dalam perencanaan. Firman Allah S.W.T :

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

Artinya:

Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya. (Ath-Thaariq: 16)

Dari firman Allah S.W.T di atas jelas Allah adalah maha sempurna dalam segala hal. Jadi Allah yang maha sempurna membuat perencanaan apalagi kita sebagai makhluk ciptaan yang lemah maka perlu sekali untuk merencanakan perbuatan kita, karena nasib kita tergantung pada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah S.W.T:

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah [767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan [768] yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

[767]. Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. Dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah. [768]. Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. (Ar-Ra'd: 11)

2.1.5 Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus, yang dilakukan terencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti halnya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Rencana pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk membimbing dan mempercepat pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Kompleksitas yang menyertai pelaksanaan tugas penting ini menyebabkan ia harus dipandang sebagai suatu proses yang menurut kesungguhan, mengingat betapa beratnya pembangunan yang jelas memerlukan cara-cara tertentu untuk merencanakannya.

Menurut Siagian (2005 : 4), mengatakan bahwa pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik, baik kepentingan masyarakat disegala bidang, baik kabupaten maupun kota. Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan daerah. (PERDA No 13 tahun 2007)

Soetomo (2009:166) mengartikan pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai

melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Soetomo dikatakan peningkatan taraf kehidupan dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian pembangunan masyarakat, Soetomo (2009:168) mengatakan pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan.

Sudjana (2001:265) Pembangunan adalah proses dinamisasi, demokratisasi, dan modernisasi. Proses dinamisasi dimaksud bahwa pembangunan masyarakat adalah kegiatan edukatif untuk membangkitkan praserta masyarakat. Program-Program pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila dapat melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemajuan masyarakat itu sendiri. Proses modernisasi berarti bahwa pembangunan masyarakat ialah upaya meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan dengan titik berat pada peningkatan aspek sosial dan ekonomi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur serta upaya proses perubahan yang lebih baik, baik kepentingan masyarakat disegala bidang, baik kabupaten maupun kota.

Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat umum. ini berarti bahwa pembangunan merupakan implementasi dari tugas pelayanan, dengan demikian pembangunan daerah pasti akan melibatkan berbagai unsur atau pihak maupun komponen baik sebagai objek maupun subjek, sehingga akan menyebabkan perbedaan kepentingan yang beragam pula. Karena perbedaan itulah diperlukan adanya koordinasi dalam proses pembangunan.

Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mensterilkan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan demikian ada beberapa alasan yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik dalam menilai perlunya koordinasi dalam pembangunan.

Menurut Riyadi (2005 : 312) bahwa perlunya adanya koordinasi dalam pembangunan yaitu :

1. Sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya aktivitas dan kepentingan yang berbeda.
2. Aktivitas dan kepentingan yang berbeda juga membawa konsekuensi logis terhadap adanya tanggung jawab yang secara fungsional berbeda pula.
3. Ada instansi, badan, lembaga yang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.
4. Adanya unsur sentralisasi dan desentralisasi yang dijalankan dalam proses pembangunan yang melibatkan instansi pusat maupun daerah.
5. Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan dalam proses pembangunan, sehingga akan tercipta suatu aktivitas yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan badan yang dibentuk oleh kepala daerah yang tugas dan fungsinya membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya, badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah,
2. Pelaksanaan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah,
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian sebuah tujuan yang diinginkan suatu organisasi, maka manajemen merupakan salah satu alat dalam pencapaian tujuan tersebut. manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan suatu organisasi, karyawan, pegawai, dan masyarakat. Menurut Harold Koontz dalam Manullang (2001 : 42) menyebutkan bahwa fungsi manajemen adalah Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Directing*), dan Pengawasan (*Kontrolling*).

2.2. Hipotesis

“Diduga Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan secara optimal”.

2.3. Definisi Konsep

Konsep adalah Abstraksi dari fenomena. Didalam fenomena terdapat definisi-definisi dan konsep-konsep. Arti dari konsep itu sendiri adalah istilah atau pengertian singkat atau abstraksi dari fenomena. (Husni Thamrin, 2008; 52)

Dalam penelitian ini dijelaskan dari masing-masing konsep untuk menghindari salah pengertian, maka definisi yang dipakai dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut :

1. Analisis Pelaksanaan Fungsi adalah kajian tentang kerja yang dilaksanakan oleh pegawai dalam melaksanakan fungsi yang diembankan kepadanya. dalam

hal ini yang menjadi perhatian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Bappeda adalah badan yang dibentuk oleh kepala daerah yang tugasnya membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian umum tugas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik, baik kepentingan masyarakat disegala bidang, baik kabupaten maupun kota. Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan daerah
5. Perencanaan Pembangunan adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dimasa akan datang berdasarkan sumber yang ada guna sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
6. Koordinasi merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

7. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
8. evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

2.4 Definisi Operasional

Operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep/variable agar dapat diukur, dengan cara melihat dimensi (indikator) dari suatu konsep/variabel. Dimensi (indikator) dapat berupa: perilaku, aspek atau sifat/karakteristik. (Juliansyah Noor, 2011; 87)

Dalam penelitian ini penulis membuat variabel penelitian dengan beberapa indikator. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Analisis Fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan indikator berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan Perencanaan Pembangunan yaitu : a) Kemampuan Dalam Merencanakan, b) Pengolahan data, dan c) Perencanaan tepat waktu. Dengan kriteria jawaban :

Baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 3 (tiga) kriteria diatas.

Cukup Baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 2 (dua) kriteria diatas.

Kurang Baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 1 (satu) kriteria diatas.

2. Pelaksanaan Pembangunan yaitu : a) Koordinasi, b) Konsultasi perencanaan, dan c). Pengendalian pembangunan. Dengan kriteria jawaban :

Baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 3 (tiga) kriteria diatas.

Cukup baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 2 (dua) kriteria diatas.

Kurang baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 1 (satu) kriteria diatas.

3. Menilai Pelaksanaan Pembangunan yaitu : a) Monitoring, b) Evaluasi, dan c) Pencapaian tujuan. Dengan kriteria jawaban :

Baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 3 (tiga) kriteria diatas.

Cukup baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 2 (dua) kriteria diatas.

Kurang baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 1 (satu) kriteria diatas.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yaitu : a) Pengamatan lapangan, b) Memantau persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan, dan c) Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan. Dengan kriteria jawaban :

Baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 3 (tiga) kriteria diatas.

Cukup baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 2 (dua) kriteria diatas.

Kurang baik : Jika dalam pelaksanaan fungsi, dalam perencanaan pembangunan memenuhi 1 (satu) kriteria diatas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian.

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk melihat fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti apakah sesuai dengan fungsinya. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan data yang diangkakan (scoring) dengan menggunakan skala pengukuran, mengembangkan kenyataan, realita yang ada di lapangan dengan menjelaskan beberapa fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan tujuan bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui survey tersebut, akan dijadikan acuan untuk menggambarkan indikator penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan dalam tipe kualitatif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Meranti. Waktu penelitian ini bermula dari bulan Maret sampai dengan Desember 2012.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan penyebaran angket dengan responden tentang pendapat atau tanggapan yang terkait

dengan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang ada hubungannya dengan penelitian ini, diantaranya sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Meranti, keadaan dan struktur organisasi tugas pokok dan fungsi bagian perencanaan pada Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.4 Populasi Dan Sampel.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2007:90), yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 25 orang pegawai.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2007:91). Sementara itu yang dijadikan sampel adalah seluruh populasi yang berjumlah 25 orang sampel, memakai sampel jenuh dengan menggunakan metode sensus dimana besar sampel sama dengan besar populasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jumlah Populasi		Jumlah Sampel	
1	Pegawai Bappeda	25 orang	Pegawai Bappeda	25 orang
	Jumlah	25 orang	Jumlah	25 orang

Sumber : Data Olahan Penelititahun 2012

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan penelitian, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan kegiatan pengumpulan data dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden dengan maksud agar memperoleh keterangan berdasarkan pilihan alternatif jawaban yang ada mengenai perencanaan pembangunan, yakni seluruh anggota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman data

yang diperlukan dalam penelitian sesuai dengan data yang dibutuhkan, yakni Kepala Bagian dan sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.6 Analisis Data

Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk table dan diuraikan secara deskriptif analitik yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan alasan atau gambaran yang terprinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan kemudian ditarik suatu kesimpulan dan didasarkan persentase dari indikator dikaitkan dengan teori-teori yang ada dan berdasarkan variabel penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten baru, pecahan dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan UU No.12 tahun 2009. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari tiga pulau utama (besar) yaitu Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Padang yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yaitu Pulau Merbau, Topang, Burung, Panjang, Menggung, Setahun, dan Berembang. Seperti dalam pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1 : Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daratan (Ha)	Persentase luas (%)	Desa dan Kelurahan
1	Tebing Tinggi	Selatpanjang	8.182	2,27	9
2	Tebing Tinggi Barat	Alai	49.480	13,75	8
3	Merbau	Teluk Belitung	111.024	30,86	14
4	Rangsang	Tanjung Samak	65.610	18.23	13
5	Rangsang Barat	Bantar	25.370	7,05	15
6	Pulau Merbau	Kuala Merbau	21.544	6,00	15
7	Tebing Tinggi Timur	Sungai Tohor	78.596	21.84	7
Jumlah			359.806	100.00	73

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2010

Dari tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas seluruh wilayah kabupaten adalah 682,285 Ha dengan wilayah darat \pm 359,806 Ha dan wilayah laut \pm 359,806 Ha, yang terdiri dari tujuh kecamatan dan 73 desa/kelurahan.

Kabupaten Kepulauan Meranti terletak di propinsi Riau bagian pesisir Timur Pulau Sumatera dengan koordinat $01^{\circ} 39' 33'' - 01^{\circ} 25' 08''$ Lintang Utara (LU) dan $102^{\circ} 10' 29'' - 103^{\circ} 16' 43''$ Bujur Timur (BT) terletak pada posisi strategis pelayaran internasional tersibuk di dunia yaitu Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada pada dua segitiga pertumbuhan ekonomi yaitu Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia dan Thailand (IMT-GT).

Berdasarkan batasan administratif pasca pemekaran, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka dan Malaysia
2. Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
3. Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
4. Timur : Berbatasan dengan Selat Pinang Masak dan Kabupaten Karimun

4.1.2 Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 176.400 jiwa, yang terdiri dari 90.500 laki-laki dan 85.900 perempuan yang menyebar di 7 (tujuh) kecamatan dan 73(tujuh puluh tiga) desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Tebing Tinggi Barat	8.000	7.200	15.200
2	Tebing Tinggi	27.900	26.600	54.500
3	Rangsang	13.700	12.700	26.400
4	Rangsang Barat	12.500	12.400	24.900
5	Merbau	15.200	14.300	29.500
6	Pulau Merbau	7.300	7.300	14.600
7	Tebing Tinggi Timur	5.900	5.400	11.300
Jumlah Penduduk		90.500	85.900	176.400

Sumber: Hasil Sensus Penduduk Provinsi Riau, 2010

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti masih tertumpu di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu sebesar 54.500 jiwa, kemudian diikuti Kecamatan Merbau sebesar 29.500 jiwa dan Kecamatan Rangsang 26.400 jiwa. Penyebaran Penduduk paling rendah pada Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebesar 11.300 jiwa. Kemudian untuk melihat kepadatan penduduk di Kab. Kep. Meranti seperti pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 : Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Luas Daratan (Ha)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Tebing Tinggi	49.480	15.200	666.1
2	Tebing Tinggi Barat	8.182	54.500	30.7
3	Merbau	111.024	26.400	40.2
4	Rangsang	65.610	24.900	98.1
5	Rangsang Barat	25.370	29.500	26.6
6	Pulau Merbau	21.544	14.600	67.8
7	Tebing Tinggi Timur	78.596	11.300	14.4
Jumlah		359.806	176.400	49.0

Sumber: Hasil Sensus Penduduk Provinsi Riau, 2010

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas wilayah sekitar 3.598,06 km² yang didiami oleh 176.400 jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebanyak 49 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi yaitu sebanyak 666 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan 14 jiwa per kilometer persegi.

4.2 Keadaan Umum BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Perencanaan Pembangunan daerah kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk Peraturan Bupati No.03 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah. Bappeda Merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Terletak di tepi jalan Dorak, No.45 A, Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, kantor yang sebelumnya bergabung dengan kantor bupati ini sekarang menempati sebuah gedung berlantai tiga yang berjarak sekitar 500 meter dari kantor Bupati Kepulauan Meranti.

4.2.1 Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti

Guna mendukung kelancaran fungsi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti sarana dan prasarana memiliki unsur penerapan yang sangat penting dan merupakan unsur pokok dalam menjalankan perputaran roda organisasi. Tanpa adanya sarana dan prasarana suatu organisasi mustahil akan bisa menjalankan fungsinya serta roda organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh Bappeda kabupaten Kepulauan Mernati dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 : Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Mobil	1	Baik
3	Motor	7	Baik
4	Komputer	12	Baik
5	Printer	9	Baik
6	Mesin Fotto Coppy	1	Baik
7	Lemari Arsip	1	Baik
8	Lemari Besi	2	Baik
9	Lemari Rak Buku	1	Baik
10	Lemari Makan	1	Baik
11	Meja Pegawai	32	Baik
12	Kursi Pegawai	35	Baik
13	AC	9	Baik
14	TV	2	Baik
Jumlah		114	Baik

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, 2011

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kondisi sarana dan prasarana Bappeda di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam keadaan baik, dengan kondisi dan keadaan sarana dan prasarana tersebut akan mampu membantu pelaksanaan fungsi Bappeda dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.2.2 Struktur Organisasi Bappeda

Setiap Organisasi haruslah mempunyai struktur yang jelas dan runut. Ini penting dibuat, karena dengan demikian pekerjaan akan dapat dikerjakan berdasarkan pengawasan yang sudah diawasi dan dipantau sebelumnya. Dengan pengawasan ini diharapkan terjadi kelancaran dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dan juga ada kejelasan tanggung jawab.

Adapun pembuatan struktur ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang.

Sedangkan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari ;

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari ;

1. Sub Bagian Perencanaan Internal;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
- c. Bidang Fisik, terdiri dari :
1. Sub Bidang Prasarana Fisik;
 2. Sub Bidang Tata Ruang.
- d. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
1. Sub Bidang Usaha Perekonomian;
 2. Sub Bidang Pertanian.
- e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
1. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan;
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- f. Bidang Litbang dan Stapel, terdiri dari :
1. Sub Bidang Litbang;
 2. Sub Bidang Stapel.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Pasal 5 Perbup No.03 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Bappeda Merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Terletak di tepi jalan Dorak, No.45 A, Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, kantor yang sebelumnya bergabung dengan kantor bupati ini sekarang

menempati sebuah gedung berlantai tiga yang berjarak sekitar 500 meter dari kantor Bupati Kepulauan Meranti.

4.2.3 Uraian Tugas (Job Description) Bagian Unit Kerja BAPPEDA

Adapun uraian tugas dari masing-masing unit kerja/bidang pada Bappeda Kab. Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut ini :

- a. Kepala, mempunyai tugas dan fungsi yaitu;
 1. Bertugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
 2. Berfungsi memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kepulauan Meranti
 3. Berfungsi mengadakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas/Instansi lain sehubungan dengan tugas dan fungsinya.
 4. Berfungsi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kab. Kepulauan Meranti.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala dibantu oleh Sekretariat dan bidang-bidang.

- b. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi yaitu:
 1. Bertugas membantu Kepala Bappeda Kab. Kepulauan Meranti di bidang Administrasi umum, Keuangan, Kepegawaian dan penyusunan rencana program kegiatan di lingkungan Bappeda Kab. Kepulauan Meranti.
 2. Berfungsi membantu Kepala Bappeda dalam;

- a) Menyusun rencana kebutuhan organisasi dan kegiatan kesekretariatan Bappeda serta pengelolaan dan pengendalian penggunaannya.
 - b) Menyusun rencana, mengelola serta bertanggung jawaban keuangan kesekretariatan Bappeda.
3. Berfungsi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda Kab. Kepulauan Meranti.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Bappeda dibantu oleh :

- a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - b) Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas dan fungsi yaitu;
- 1. Bertugas membantu Kepala Bappeda dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana infrastruktur serta penilaian atas pelaksanaannya.
 - 2. Berfungsi menyusun rencanan pembangunan dibidang perhubungan, pemukiman, dan pengembangan prasarana wilayah, sumber daya alam, pertambangan energi dan lingkungan hidup, tata ruang serta pengairan.
 - 3. Berfungsi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang perhubungan, pemukiman, dan pengembangan prasarana wilayah, sumber daya alam, pertambangan energi dan lingkungan hidup, tata ruang serta pengairan

4. Berfungsi melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dibidang perhubungan, pemukiman, dan pengembangan prasarana wilayah, sumber daya alam, pertambangan energi dan lingkungan hidup, tata ruang serta pengairan.
5. Berfungsi melakukan inventarisasi terhadap permasalahan bidang fisik prasarana dan perumusan langkah-langkah pemecahannya.
6. Berfungsi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang fisik dan Prasarana dibantu oleh;

- a) Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana
- b) Kepala Sub Bidang Tata Ruang

c. Bidang Ekonomi mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1. Bertugas membantu Kepala Bappeda di dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Berfungsi menyusun rencana pembangunan dibidang perdagangan, perindustrian, jasa, pariwisata, pertambangan energi, koperasi, UMKM dan pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta pendapatan daerah.
3. Berfungsi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang perdagangan, perindustrian, jasa, pariwisata, pertambangan

energi, koperasi, UMKM dan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan ketahanan pangan serta pendapatan daerah.

4. Berfungsi melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dibidang perdagangan, perindustrian, jasa, pariwisata, pertambangan energi, koperasi, UMKM dan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan ketahanan pangan serta pendapatan daerah.
 5. Berfungsi melakukan inventarisasi permasalahan bidang pembangunan ekonomi dan perumusan langkah-langkah pemecahannya.
- d. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas dan fungsi yaitu:
1. Bertugas membantu Kepala Bappeda dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya serta penilaian atas pelaksanaannya.
 2. Berfungsi menyusun rencana pembangunan dibidang kependudukan, pendidikan, pemuda olah raga, budaya, seni dan pariwisata, kesehatan, kesejahteraan sosial, penerangan, agama, pemeritahan dan sumber daya manusia.
 3. Berfungsi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dibidang kependudukan, pendidikan, pemuda olah raga, budaya, seni dan pariwisata, kesehatan, kesejahteraan sosial, penerangan, agama, pemeritahan dan sumber daya manusia.
 4. Berfungsi melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang kependudukan, pendidikan, pemuda olah raga,

budaya, seni dan pariwisata, kesehatan, kesejahteraan sosial, penerangan, agama, pemeritahan dan sumber daya manusia.

5. Berfungsi melakukan inventarisasi permasalahan bidang sosial budaya dan perumusan langkah-langkah pemecahannya.
6. Berfungsi melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan arahan dan petunjuk Kepala Bappeda.

Dalam menjalankan tugas, Kepala Bidang Sosial Budaya di bantu oleh;

- a) Kepala Sub Bidang sosial kemasyarakatan
- b) Kepala Sub Bidang Budaya

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1. Bertugas membantu Kepala Bappeda dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah .
2. Berfungsi menyusun rencana program kegiatan penelitian dan pengembangan
3. Berfungsi Menginventarisasi.

g. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1. Bertugas membantu Kepala Bappeda dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal serta penilaian atas pelaksanaanya.
2. Berfungsi menyusun rencana pembangunan dalam rangka pengembangan investasi daerah dengan melaksanakan pengkajian

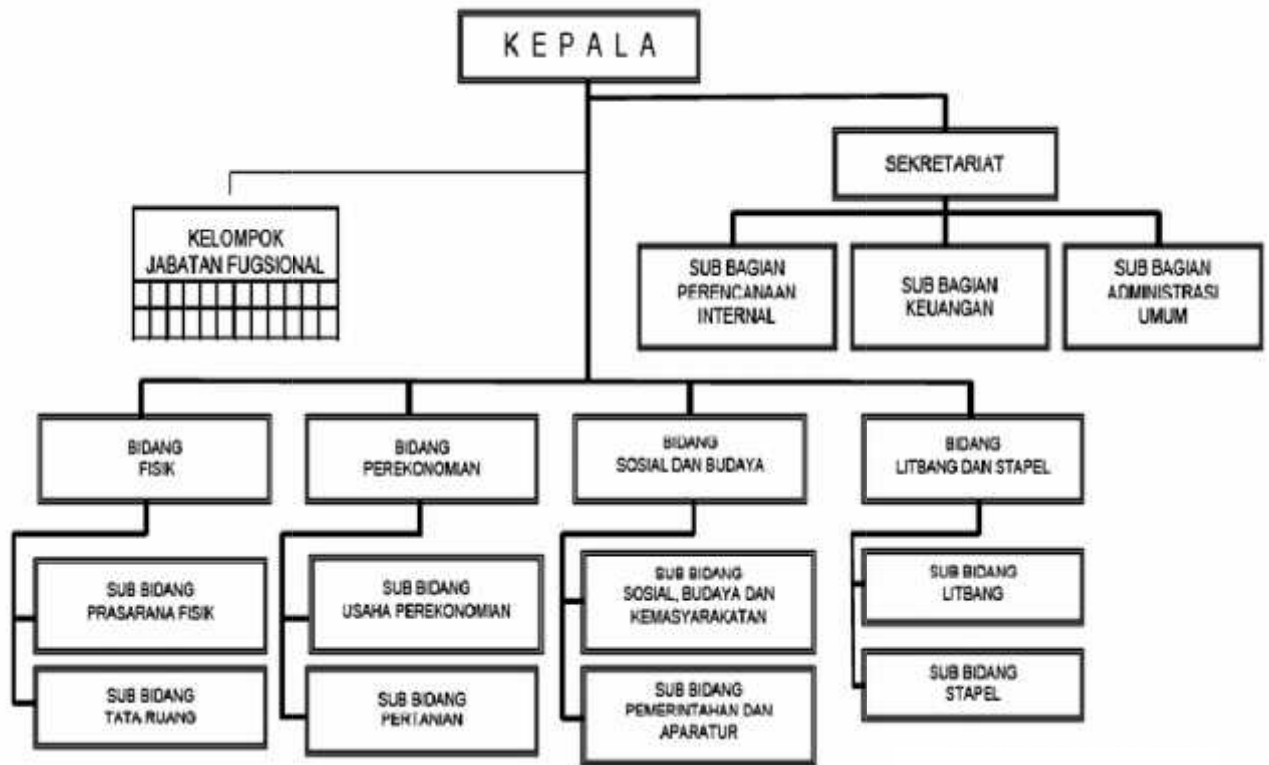
terhadap potensi dan peluang investasi daerah, kerjasama dan promosi daerah.

3. Berfungsi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengembangan investasi daerah dengan melaksanakan pengkajian terhadap potensi dan peluang investasi daerah, kerjasama dan promosi daerah.
4. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan penanaman modal daerah.
5. Melaksanakan inventarisasi terhadap permasalahan penanaman modal daerah dan perumusan langkah-langkah pemecahnya.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penanaman Modal dibantu oleh;

- a) Kepala Sub Bidang Kajian
- b) Kepala Sub Bidang Penanaman Modal

Gambar 4.1 : Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, No. 03 Tahun 2011

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Sebelum hasil ini disampaikan, untuk memperoleh informasi penelitian maka peneliti akan menjabarkan identitas responden. Adapun responden disini adalah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel yang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Responden penelitian ini terdiri dari kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Untuk lebih jelas tentang responden ditinjau dari jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 5.1 : Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	17	68 %
2	Perempuan	8	32 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan, yakni jumlah responden laki-laki sebanyak 17 orang atau 68 % dan jumlah responden perempuan sebanyak 8 orang atau 32 %.

Jumlah responden berdasarkan tabel diatas, juga memiliki memiliki pendidikan yang berbeda-beda. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 : Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA	3	12 %
2	Diploma 3 (D3)	3	12 %
3	Strata 1 (S1)	14	56 %
4	Strata 2 (S2)	5	20 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Menurut tabel diatas maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagian besar yaitu perguruan tinggi Sarjana Strata 1 (S1) adalah 14 orang atau 65 %, dan berpendidikan Sarjana Strata 2 (S2) adalah 5 orang atau 20 %, serta yang memiliki pendidikan lulusan SMA dan Diploma 3 orang atau 12 %. Berarti tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kebanya yaitu berpendidikan perguruan tinggi (S1).

5.2 Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Analisis fungsi badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam penelitian ini akan diuraikan satu persatu dari setiap penilaian yang diberikan responden terhadap fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti baik itu dengan menjawab kuesioner yang telah disebarkan maupun jawaban-jawaban responden sewaktu wawancara.

5.2.1 Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan

Perumusan perencanaan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab penuh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), untuk mencapai tujuan perencanaan pembangunan yang diinginkan harus memiliki perumusan perencanaan pembangunan yang baik sebagai acuan arah pembangunan yang direncanakan sebelumnya. Jadi sebuah perencanaan pembangunan daerah baik atau tidak baiknya akan dilihat dari kemampuan bagaimana badan yang terkait dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang ada pada suatu daerah tersebut.

Sehubungan dengan kemampuan dalam perumusan perencanaan pembangunan salah satu faktor yang sangat mendukung yaitu adanya data yang mendukung terkait dengan perencanaan pembangunan, serta dibutuhkan kemampuan dalam mengolah data, karena tanpa adanya kemampuan pengolahan perencanaan pembangunan maka sebuah perencanaan pembangunan tidak akan menjadi sebuah acuan yang baik dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dibawah ini akan

dipaparkan mengenai jawaban responden terhadap pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perumusan perencanaan pembangunan ditinjau dari beberapa aspek yaitu kemampuan dalam merencanakan, pengolahan data, dan perencanaan tepat waktu.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perumusan perencanaan pembangunan ditinjau dari aspek kemampuan dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 : Jawaban Responden Tentang Kemampuan Bappeda Dalam Merencanakan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	8	32 %
2	Cukup	10	40 %
3	Kurang Baik	7	28 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang atau 40 % menilai cukup, serta 8 orang atau 32 % menilai baik terhadap kemampuan Bappeda dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun sebaliknya masih ada responden yakni 7 orang atau 28 % yang menilai kurang baik.

Dari jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa kemampuan Bappeda dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai cukup. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.3 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang

atau 40 % menilai cukup. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian lapangan bahwa mereka yang menilai cukup dengan alasan karena keterbatasannya sumber daya manusia (SDM). Begitu juga responden yang menilai baik mereka memberikan alasan karena sudah adanya kemajuan dari tahun ke tahun, serta dalam perencanaan sudah ada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Hasil penelitian diatas juga didukung oleh penyampaian ketua Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti pada wawancara yang peneliti lakukan yakni Bapak Mohamad Azza Faroni, beliau mengatakan:

“Bappeda memiliki unsur yang sangat besar dalam pembangunan daerah, karena segala perencanaan pembangunan yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan adalah Bappeda dan untuk perencanaan pembangunan sudah ada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)”.

Selanjutnya untuk melihat jawaban responden tentang kemampuan bappeda dalam pengolahan data perencanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4 : Jawaban Responden Tentang Kemampuan Bappeda Dalam Pengolahan Data Perencanakan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	11	44 %
2	Cukup	8	32 %
3	Kurang Baik	6	24 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 11 orang atau 44 % menilai baik terhadap kemampuan Bappeda dalam pengolahan data perencanan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta 8 orang atau 32 % menilai cukup. Namun sebaliknya masih ada responden yang menilai kurang baik yakni 6 orang atau 24 %.

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa kemampuan Bappeda dalam pengolahan data perencanan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai cukup. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.4 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 11 orang atau 44 % menilai baik. Berdasarkan penilaian tersebut kebanyakan responden memberikan alasan karena adanya bantuan dari berapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memberikan data.

Hasil penelitian diatas juga didukung oleh penyampaian ketua Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti pada wawancara yang peneliti lakukan yakni Bapak Mohamad Azza Faroni, beliau mengatakan:

“Data penunjang merupakan sarana pendukung yang sangat dibutuhkan bagi kelancaran pembangunan. terutama dalam pembangunan fisik, seperti data mengenai lokasi, keadaan tanah, keadaan lokasi, pengadaan matrial, anggaran yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Karena data-data tersebut merupakan unsur kelancaran sebuah proyek fisik”.

Selanjutnya untuk melihat jawaban responden tentang perencanan pembangunan Bappeda dalam perencanaan tepat Waktu Di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.5 : Jawaban Responden Tentang Perencanakan Pembangunan Bappeda Dalam Perencanaan Tepat Waktu Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	5	20 %
2	Cukup	11	44 %
3	Kurang Baik	9	36 %
Jumlah		31	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 11 orang atau 44 % menilai cukup terhadap perencanakan pembangunan Bappeda dalam perencanaan tepat waktu di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta 5 orang atau 20 % menilai baik. Namun sebaliknya responden yang menilai kurang baik yakni 9 orang atau 36 %.

Dari jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa kemampuan Bappeda terhadap perencanakan pembangunan dalam perencanaan tepat waktu di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai cukup. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.5 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 11 orang atau 44 % menilai kurang baik.

Hasil penelitian diatas juga didukung oleh penyampaian salah seorang staf Bidang Sumber Daya dan Aparatur Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti pada wawancara yang peneliti lakukan yakni Bapak Eko Priyono, beliau mengatakan :

“Dalam hal pembangunan tidak terlepas dari peran semua pihak, baik Bappeda sebagai penanggung jawab maupun SKPD sebagai pengguna anggaran, di sinilah peran SKPD untuk mendukung perencanaan yang tepat waktu. Tetapi selama ini yang dirasakan justru SKPD kurang mendukung. Dan sering terjadi perubahan anggaran dalam SKPD”.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden tentang pelaksanaan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang Baik	
1	Kemampuan dalam merencanakan	8	10	7	25
		32 %	40 %	28 %	100 %
2	Kemampuan pengolahan data	11	8	6	25
		44 %	32 %	24 %	100 %
3	Perencanaan tepat waktu	5	11	9	25
		20 %	44 %	37 %	100 %
Total		24	29	22	75
		32 %	38.67 %	29.33 %	100 %
Rata-rata		8	9.67	7.33	25
		32 %	38.67 %	29.32 %	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 38.67 % menilai pelaksanaan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti cukup, namun masih ada juga responden yang menilai kurang baik yakni 29.33 % serta ada juga responden yakni 32 % yang menilai baik.

Melalui uraian diatas dapat di artikan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan cukup karena

penilaian terhadap seluruh item indikator, namun ada juga yang menilai kurang bahkan baik.

Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan kepala Bappeda yakni Bapak Mohamad Azza Faroni, beliau mengatakan :

“Berbicara tentang perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah masalah sumber daya manusianya (SDM). jadi kalau dikatakan kurang maksimalnya fungsi Bappeda dalam perencanaan itu sumber daya manusianya”.

Menurut uraian penelitian diatas dapat di analisis bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan cukup dan fungsi Bappeda dalam perencanaan sudah menjalankan fungsinya, hal ini dibuktikan bahwa dalam perencanaan pembangunan sudah acuan perencanaan yakni perumusan RPJMD dan RPJPD. Namun dalam implementasinya harus didukung oleh seluruh SKPD dalam segala hal, terutama dalam pembangunan fisik harus didukung oleh data yang akurat dan SDM yang berkompeten dalam perencanaan. Karena data yang akurat dan SDM yang berkompeten merupakan unsur kelancaran sebuah proyek fisik dalam pencapaian tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

5.2.2 Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan pasti akan melibatkan berbagai unsur atau pihak maupun komponen baik sebagai objek maupun subjek, maka perlu adanya penyesuaian dan penyesuaian aktivitas-aktivitas dari kegiatan pembangunan. Dengan demikian perlu adanya koordinasi dalam pembangunan guna terciptannya suatu

aktivitas pelaksanaan pembangunan yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama.

Aktivitas atau kegiatan yang berlangsung dalam pelaksanaan pembangunan dari berbagai pihak akan menimbulkan perbedaan kepentingan, sehingga perlu adanya konsultasi pembangunan guna mengendalikan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan umum. Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jawaban responden terhadap pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan pembangunan ditinjau dari beberapa aspek yaitu koordinasi, konsultasi perencanaan, dan pengendalian pembangunan.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan pembangunan ditinjau dari aspek koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.7 : Jawaban Responden Tentang Koordinasi Bappeda Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	5	20 %
2	Cukup	11	44 %
3	Kurang Baik	9	36 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Menurut tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 11 orang atau 44 % menilai cukup, serta 5 orang atau 20 % menilai baik terhadap koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan

Meranti. Namun sebaliknya masih ada responden yakni 9 orang atau 36 % yang menilai kurang baik.

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa koordinasi Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai cukup. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.7 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 13 11 orang atau 44 % menilai cukup.

Hasil penelitian diatas juga didukung oleh penyampaian salah seorang sub Bidang Administrasi Umum Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti pada wawancara yang peneliti lakukan yakni Ibu T. Nurul Aini, beliau mengatakan :

“Masalah pelaksanaan koordinasi pembangunan, Bappeda sudah ada bidang atau tim dalam melaksanakan koordinasi pembangunan tersebut. Tentunya koordinasi dalam pelaksanaan sebuah pembangunan sangat diperlukan, hal ini agar tidak terjadi simpang siur terhadap pembangunan itu sendiri, dan disini Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan sebagaimana tugasnya yaitu perencanaan, pembangunan dan pengawasan”.

Selanjutnya untuk melihat jawaban responden tentang Fungsi Bappeda Dalam Konsultasi Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.8 : Jawaban Responden Tentang Fungsi Bappeda Dalam Konsultasi Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	8	32 %
2	Cukup	10	40 %
3	Kurang Baik	7	28 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang atau 40 % menilai cukup, serta 8 orang atau 32 % menilai baik terhadap fungsi Bappeda dalam konsultasi perencananan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, namun masih ada juga responden yakni 7 orang atau 28 % yang menilai kurang baik.

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa konsultasi Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai cukup. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.8 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang atau 40 % menilai cukup.

Hasil penelitian diatas juga didukung oleh penyampaian Sekretaris Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti pada wawancara yang peneliti lakukan yakni Bapak Rokhaizal, beliau mengatakan :

“Pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan, Bappeda sudah sudah melaksanakan konsultasi dengan instansi terkait, baik secara vartikal maupun horizontal dan untuk menjaga arah pembanguan yang yang stabil dan Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru dalam hal perencanaan pembangunan harus perbanyak shering ke pemerintahan pusat”.

Selanjutnya untuk melihat jawaban responden tentang pelaksanaan pengendalian pembanguunan Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.9 : Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Bappeda Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	7	28 %
2	Cukup	8	32 %
3	Kurang Baik	10	40 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang atau 40 % menilai kurang baik, serta 8 orang atau 32 % menilai cukup terhadap pelaksanaan pengendalian pembangunan Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun ada juga responden yakni 7 orang atau 28 % yang menilai baik.

Dari jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan pengendalian pembangunan Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti kurang baik. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.9 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang atau 40 % menilai cukup dan kurang baik.

Hasil penelitian diatas juga didukung oleh penyampaian salah seorang Kasubid Pertanian Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti pada wawancara yang peneliti lakukan yakni Bapak Sudarmadi , beliau mengatakan :

“Pengendalian pembangunan melihat pada akhir pelaksanaan pembangunan, jadi Bappeda dilihat dari segi pengendalian pembangunan ini masih kurang maksimal karena Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti ini masih tergolong baru. Jadi harus melihat pada perkembangan pembangunan”.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden tentang pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.10 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang Baik	
1	Koordinasi	5	11	9	25
		20 %	44 %	36 %	100 %
2	Konsultasi Perencanaan	8	10	7	25
		32 %	40 %	28 %	100 %
3	Pengendalian Pembangunan	7	8	10	25
		28 %	32 %	40 %	100 %
Total		20	29	26	75
		26.66 %	38.67 %	34.67 %	100 %
Rata-rata		6.66	9.67	8.67	25
		26.64 %	38.68 %	34.68 %	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 38.67 % menilai pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan cukup, serta ada juga responden yakni 26.66 % yang menilai baik. Namun masih ada juga responden yang menilai kurang baik yakni 34.67 %.

Menurut uraian diatas dapat di artikan bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan cukup karena penilaian

terhadap seluruh item indikator, namun ada juga yang menilai baik bahkan kurang baik.

Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan kepala Bappeda yakni Bapak Mohamad Azza Faroni, beliau mengatakan :

“Untuk meningkatkan kualitas Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu adanya kerja sama yang baik diantara sesama instansi terkait, dan harus adanya koordinasi yang baik agar keseimbangan pembangunan dapat dicapai”.

Berdasarkan uraian penelitian diatas dapat di analisis bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan cukup karena dalam pelaksanaan pemabangunan Bappeda sudah menjalankan fungsinya yakni koordinasi dan konsultasi dalam pembangunan, sehingga simpang siaur atau permasalahan-permasalahan dalam pembangunan dapat minimalisir. Namun sebagai kabupaten yang baru tingkat kualitas kinerja harus senantiasa ditingkatkan, terutama dalam pengendalian pembangunan harus melihat pada kepentingan masyarakat bersama.

5.2.3 Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Menilai Pelaksanaan Pembangunan

Menilai pelaksanaan pembangunan merupakan kegiatan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan itu berlangsung, untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat dibutuhkan sekali pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan monitoring dalam prakteknya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, serta untuk menilai terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan dalam pembangunan perlu adanya pelaksanaan evaluasi guna sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil atau tujuan yang seharusnya dicapai. Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jawaban responden terhadap pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menilai pelaksanaan pembangunan ditinjau dari beberapa aspek yaitu monitoring, evaluasi, dan pencapaian tujuan.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menilai pelaksanaan pembangunan ditinjau dari aspek monitoring Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.11 : Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Monitoring Bappeda Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	8	23 %
2	Cukup	9	36 %
3	Kurang Baik	8	32 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 9 orang atau 36 % menilai cukup terhadap pelaksanaan monitoring Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, namun masih ada juga responden yakni 8 orang atau 32 % juga yang menilai baik dan kurang baik.

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan monitoring Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai cukup. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.11 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 9 orang atau 36 % menilai cukup.

Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan kepala Bappeda yakni Bapak Mohamad Azza Faroni, beliau mengatakan :

“Pelaksanaan monitoring memang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan guna memantau pelaksanaan pembangunan, dalam hal monitoring sudah ada tim sendiri untuk memonitoring pelaksanaan pembangunan ini. Berkaitan dengan kegiatan monitoring Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih kurang maksimal atau tidak optimal. Hal ini masih terkait dengan masalah SDM, yaitu terbatasnya sumber daya manusia, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pembangunan tidak akan terlepas dari dua hal tersebut, hal ini dimaksud agar kedepanya bisa dijadikan tolak ukur untuk lebih berkembang dalam pembangunan”.

Selanjutnya untuk melihat jawaban responden tentang pelaksanaan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.12 : Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Evaluasi Bappeda Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	9	36 %
2	Cukup	11	44 %
3	Kurang Baik	5	20 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 11 orang atau 44 % menilai cukup, serta 5 orang atau 20 % menilai kurang baik terhadap pelaksanaan evaluasi Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan ada juga responden yakni 9 orang atau 36 % juga yang menilai baik.

Dari jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai cukup. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.12 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 11 orang atau 44 % menilai cukup.

Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan kepala Bappeda yakni Bapak Mohamad Azza Faroni, beliau mengatakan :

“Permasalahan pelaksanaan evaluasi masih sama dengan monitoring masih kurang maksimal atau tidak optimal. Hal ini masih terkait dengan masalah SDM, karena evaluasi pembangunan haruslah dilaksanakan oleh pihak yang benar-benar memiliki kemampuan dibidangnya, agar hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan bisa diminimalisir”.

Selanjutnya untuk melihat jawaban responden tentang perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.13 : Jawaban Responden Tentang Perencanaan Pembangunan Bappeda Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	9	36 %
2	Cukup	10	40 %
3	Kurang Baik	6	24 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang atau 40 % menilai cukup, serta 9 orang atau 29.03 % menilai baik terhadap perencanaan pembangunan Bappeda dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, namun masih ada juga responden yakni 6 orang atau 24 % juga yang menilai baik.

Dari jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan Bappeda dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai kurang baik. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.13 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang atau 40 % menilai kurang baik. Kebanyakan respon yang menilai kurang baik karena SKPD selalu mengalami perubahan anggaran dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan sub Bidang Administrasi Umum Bappeda yakni Ibu T. Nurul Aini, beliau mengatakan :

“Pencapaian tujuan merupakan hasil akhir dari perencanaan pembangunan, setiap tujuan sudah jelas tergambar dalam RPJMD dan Renstradari setiap SKPD. Namun tujuan yang ingin dicapai pembangunan ini selalu mengalami perubahan anggaran, misalnya dalam pembangunan fisik hal yang sangat mempengaruhi yaitu dari segi anggaran dana, letak geografi atau jenis tanah, dan pengadaan barang material. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang terdiri dari beberapa pulau dan tanah yang gambut. Hal ini dalam pembangunan fisik akan membutuhkan dana yang banyak, misalkan dalam pembangunan jalan dalam anggaran sekian meter dengan dana sekian, pada realisasinya mungkin hanya sekian meter dan tidak sesuai perencanaan. Hal ini karena jika tanah yang dibangun tanah gambut akan membutuhkan bahan yang lebih dan otomatis dana yang lebih pula,”.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden tentang pelaksanaan fungsi Bappeda dalam menilai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.14 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Menilai Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang Baik	
1	Monitoring	8	9	8	25
		32 %	36 %	32 %	100 %
2	Evaluasi	9	11	5	25
		36 %	44 %	20 %	100 %
3	Pencapaian tujuan	9	10	6	25
		36 %	40 %	24 %	100 %
Total		26	30	19	75
		34.67 %	40 %	25.33 %	100 %
Rata-rata		8.67	10	6.33	25
		34.68 %	40 %	25.33 %	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Menurut uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 40 % menilai pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menilai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan cukup, serta ada juga responden yakni 34.68 % yang menilai baik. Namun ada juga responden yang menilai kurang baik yakni 25.32 %.

Berdasarkan uraian diatas, artinya bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda dalam menilai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan cukup karena penilaian terhadap seluruh item indikator, namun ada juga yang menilai baik bahkan kurang baik.

Dari uraian penelitian diatas dapat di analisis bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menilai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan cukup, pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna menilai pelaksanaan pembangunan sudah berjalan sesuai fungsinya. Terkait dengan penilaiaan pembangunan yang akan menjadi acuan pembangunan kedepannya harus memiliki SDM yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidangnya, karena sesuai yang dirasakan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru mekar masih memiliki SDM yang minim, seperti dalam pencapaian tujuan pembangunan masih memiliki persoalan seperti SDA yang terbatas terkait letak geografi yang berpulau-pulau. Disinilah peran SDM sangat berperan penting dalam menilai pembangunan dan untuk melihat arah pembangunan kedepannya.

5.2.4 Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati

Tugas lain yang diberikan oleh bupati merupakan penjabaran kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan dalam artian kata untuk memperpanjang tangan Bupati dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diemban tugas oleh Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta menilai atas pelaksanaannya. Artinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Kepulauan Meranti berfungsi membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan.

Dalam menjalankan fungsinya, Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti diberikan wewenang dalam pengembangan pembangunan, khususnya dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jawaban responden terhadap pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yaitu pengamatan lapangan, memantau persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan, dan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ditinjau dari aspek pelaksanaan pengamatan lapangan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.15: Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pengamatan Lapangan Bappeda Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	12	48 %
2	Cukup	7	28 %
3	Kurang Baik	6	24 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 12 orang atau 48 % menilai baik, serta 7 orang atau 28 % menilai cukup terhadap pelaksanaan pengamatan lapangan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun masih ada juga responden yakni 6 orang atau 24 % juga yang menilai kurang baik.

Dari jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan pengamatan lapangan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai baik. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.15 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 12 orang atau 48 % menilai baik.

Hasil penelitian diatas juga didukung oleh penyampaian salah seorang Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti pada wawancara yang peneliti lakukan Bapak Firman Purnawan, beliau mengatakan :

“Pengamatan lapangan dalam pembangunan dilaksanakan guna melihat arah pembangunan yang berlangsung. Bappeda dalam perencanaan pembangunan untuk menentukan arah pembangunan sering melihat pada pengamatan dilapangan”.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden tentang fungsi Bappeda dalam memantau persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.16 : Jawaban Responden Tentang Fungsi Bappeda Dalam Memantau Persiapan dan Perkembangan Pelaksanaan Perencanaan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	10	40 %
2	Cukup	9	36%
3	Kurang Baik	6	24 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Menurut tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang atau 40% menilai baik, serta 9 orang atau 36 % menilai cukup terhadap pelaksanaan fungsi Bappeda dalam memantau persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun masih ada juga responden yakni 6 orang atau 24 % juga yang menilai baik.

Dari jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda dalam memantau persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai baik. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.16 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang atau 40 % menilai baik. Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan Kabid Sosial dan Budaya Bappeda yakni Bapak Budi Hartoyo, beliau mengatakan :

“Pelaksanaan persiapan dan perkembangan perencanaan dilakukan setiap tahun melalui Musranbag kabupaten. Bappeda akan memberi tahu kepada seluruh SKPD atau akan mendapat undangan mengengai persiapan pembangunan

yang diadakan melalui Musranbag dan mengenai pengembangan perencanaan pembangunan akan dibahas pada Musranbag tersebut’.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden tentang pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam memantau persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel 5.17 dibawah ini :

Tabel 5.17 : Jawaban Responden Tentang Fungsi Bappeda Dalam Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	7	28 %
2	Cukup	10	40 %
3	Kurang Baik	8	32 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang atau 40 % menilai cukup, serta 8 orang atau 32 % menilai cukup terhadap pelaksanaan fungsi Bappeda dalam memantau persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun masih ada juga responden yakni 7 orang atau 28 % juga yang menilai baik.

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda dalam penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti cukup. Hal ini dibuktikan dari tabel 5.17 diatas bahwa kebanyakan responden yakni 10 orang atau 40 % menilai baik.

Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan kepala Bappeda yakni Bapak Mohamad Azza Faroni, beliau mengatakan :

“Permasalahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan belum terbentuk secara optimal seharusnya ada tim khusus penelitian pembangunan guna perkembangan pembangunan”.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden tentang fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.18 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi (BAPPEDA) Dalam Pelaksanaan Tugas Lain Yang di Berikan Oleh Bupati

No	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang Baik	
1	Pengamatan lapangan	12	7	6	25
		48 %	28 %	24 %	100 %
2	Memantau persiapan dan perkembangan perencanaan	10	9	6	25
		40 %	36 %	24 %	100 %
3	Penelitian dan pengembangan perencanaan	7	10	8	25
		28 %	40 %	32 %	100 %
Total		29	26	20	75
		38.67 %	34.67 %	26.66 %	100 %
Rata-rata		9.67	8.67	6.66	25
		38.68 %	34.68 %	26.64 %	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Menurut uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 38.67 % menilai tentang fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan baik, serta ada juga responden

yakni 34.67 % yang menilai cukup. Namun masih ada juga responden yang menilai kurang baik yakni 26.66 %.

Berdasarkan uraian diatas, artinya bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan baik karena penilaian terhadap seluruh item indikator, namun ada juga yang menilai cukup bahkan kurang baik.

Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan kepala Bappeda yakni Bapak Mohamad Azza Faroni, beliau mengatakan :

“Dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati, Bappeda sering menghadiri Musyawarah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan guna mengusulkan kegiatan perencanaan pembangunan”.

Dari uraian penelitian diatas dapat di analisis bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikategorikan baik, pelaksanaan pengamatan lapangan guna melihat arah pembangunan yang berlangsung sehingga persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan benar-benar melihat pada perkembangan pembangunan yang berlangsung. Namun dalam penelitian dan pengembangan pembangunan harus mampu menentukan arah pembangunan sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia dan keadaan geografi daerah. Sehingga pada implementasi perencanaan pembangunan daerah mampu meminimalisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada pembangunan, oleh

karena itu dalam hal ini harus memiliki tim yang solid dan perkompeten pada penelitian dan pengembangan pembangunan

5.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dari beberapa uraian tabel sebelumnya mengenai jawaban responden terhadap fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari :

1. Perumusan Perencanaan Pembangunan yaitu :
 - a. Kemampuan dalam merencanakan,
 - b. Pengolahan data,
 - c. Perencanaan tepat waktu.
2. Pelaksanaan Pembangunan yaitu :
 - a. Koordinasi,
 - b. Konsultasi perencanaan,
 - c. Pengendalian pembangunan.
3. Menilai Pelaksanaan Pembangunan yaitu :
 - a. Monitoring,
 - b. Evaluasi, dan
 - c. Pencapaian tujuan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yaitu :
 - a. Pengamatan lapangan,

- b. Memantau persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan,
- c. Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan.

Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi jawaban responden tentang fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dibawah ini.

Tabel 5.19 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang Baik	
1	Perumusan perencanaan pembangunan	24	29	22	75
		32 %	38.67 %	29.33 %	100 %
2	Pelaksanaan pembangunan	20	29	26	75
		26.66 %	38.67 %	34.67 %	100 %
3	Menilai pelaksanaan pembangunan	26	30	19	75
		34.67 %	40 %	25.33 %	100 %
4	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati	29	26	20	75
		38.67 %	34.67 %	26.66 %	100 %
Total		99	114	87	300
		33 %	38 %	29 %	100 %
Rata-rata		8.25	9.5	7.25	25
		33 %	38 %	29 %	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2012

Menurut tabel diatas tentang rekapitulasi jawaban responden fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, ternyata kebanyakan responden yaitu 38 % menilai cukup, serta yang menilai baik yaitu 33 %. Namun masih ada responden yang menilai kurang baik yaitu 29 %.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti belum bisa dikatakan baik tetapi masih cukup, hal ini karena kebanyakan responden menilai cukup, bahkan masih ada juga responden yang menilai kurang baik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti harus selalu mengevaluasi terhadap pelaksanaan fungsinya terkait dengan kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, karena Bappeda merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan daerah.

Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden diatas tentang dapat dianalisis bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tergolong cukup, hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda tidak menutup kemungkinan menemui berbagai kendala atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsinya maupun program yang dijalankan.

5.4. Faktor-Faktor Yang Menghambat Belum Terealisasinya Program Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Adapun faktor-faktor yang menghambat belum terealisasinya program Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

1. Perencanaan yang belum matang. Perencanaan merupakan acuan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, jadi sebuah perencanaan yang belum matang akan mengakibatkan minimnya tujuan yang akan dicapai. Belum matangnya sebuah perencanaan bisa diakibatkan karena kurangnya data dalam perencanaan.
2. Belum tersedianya informasi kajian yang memberikan arah tentang perencanaan. Sebuah perencanaan pembangunan harus didukung oleh informasi kajian tentang sebuah perencanaan pembangunan, misalnya dalam perencanaan pembangunan jembatan harus mempunyai informasi kajian yang akurat guna memberikan arah dalam proses perencanaan .
3. Terbatasnya kesediaan data dalam perencanaan, data merupakan bahan acuan dasar bagi perencanaan pembangunan daerah.
4. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) Bappeda dalam menjalankan fungsi perencanaan. SDM merupakan subjek yang sangat penting dalam perencanaan, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam perencanaan sebuah pembangunan tidak akan terealisasi sebagaimana yang diinginkan.
5. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, sarana dan prasarana merupakan alat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan.

Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan kepala Bappeda yakni Bapak Mohamad Azza Faroni, beliau mengatakan :

“Faktor utama yang menghambat fungsi Bappeda yang menonjol yaitu masalah sumber daya manusia, kurang kompetenya SDM dan staf pegawai Bappeda yang kurang mencukupi karena masih adanya bidang-bidang tertentu yang masih kosong. Begitu juga dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti halnya gedung kantor yang masih ngontrak. Hal ini mungkin bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepan karena Bappeda merupakan unsure yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti ini”.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda berdasarkan penilaian setiap indikator yaitu :

1. Perumusan perencanaan pembangunan dinilai dalam kategorikan cukup
2. Pelaksanaan pembangunan dinilai dalam kategorikan cukup
3. Menilai pelaksanaan pembangunan dinilai dalam kategorikan cukup, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dinilai dalam kategorikan baik.

Menurut uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda di Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan masih belum bisa dikatakan baik tetapi masih cukup, karena kebanyakan responden dominan menilai cukup. Hal ini seperti yang terurai pada tabel 5.19 diatas tentang rekapitulasi tanggapan responden terhadap fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni kebanyakan responden yaitu 38 % menilai cukup, serta yang menilai baik yaitu 33 %. Namun masih ada responden yang menilai kurang baik yaitu 29 %, Artinya bahwa pelaksanaan fungsi Bappeda tidak menutup kemungkinan menemui berbagai

kendala atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan fungsinya maupun program yang dijalankan, hal ini mengidentifikasikan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti harus selalu mengevaluasi terhadap pelaksanaan fungsinya terkait dengan kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, karena Bappeda merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan daerah.

Menurut Todaro, (2000:67) bahwa kegagalan proses perencanaan diakibatkan oleh sejumlah masalah khusus tertentu, yaitu :

1. Keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya.
2. Data-data yang tidak memadai dan tidak handal.
3. Goyolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
4. Kelemahan kelembagaan.
5. Kurangnya kemauan politik.

Seiring dengan teori diatas, masih ditemukannya hambatan-hambatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi Bappeda di Kabupaten Kepulauan Meranti diantaranya :

1. Belum tersedianya informasi kajian yang memberikan arah tentang perencanaan. Sebuah perencanaan pembangunan harus didukung oleh informasi kajian tentang sebuah perencanaan pembangunan, misalnya dalam perencanaan pembangunan jembatan harus mempunyai informasi kajian yang akurat guna memberikan arah dalam proses perencanaan .

2. Terbatasnya kesediaan data dalam perencanaan, data merupakan bahan acuan dasar bagi perencanaan pembangunan daerah
3. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) Bappeda dalam menjalankan fungsi perencanaan. SDM merupakan subjek yang sangat penting dalam perencanaan, tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan sebuah pembangunan tidak akan terealisasi sebagaimana yang diinginkan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, sarana dan prasarana merupakan alat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan.
5. Perencanaan yang belum matang. Perencanaan merupakan acuan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, jadi sebuah perencanaan yang belum matang akan mengakibatkan minimnya tujuan yang akan dicapai. Belum matangnya sebuah perencanaan bisa diakibatkan karena kurangnya data dalam perencanaan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas demi mencapai pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih baik, penulis ingin mencoba memberikan saran yang mungkin berguna dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terutama dalam kajian perencanaan.
2. Peningkatan dan pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten pada staf Bappeda.
3. Pemerintah pusat maupun daerah lebih memperhatikan kondisi Bappeda sebagai sarana pembangunan, karena Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru berkembang.
4. Peningkatan sarana dan prasarana Bappeda.
5. Staf pegawai Bappeda lebih diharapkan putra daerah agar lebih mengetahui perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, tidak hanya puas dengan dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya secara baik.
6. Selalu mencari informasi terhadap perkembangan pembangunan dan belajar dari kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pustaka Jogja Mandiri. Yogyakarta.
- Afiffuddin. 2010, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta. Bandung.
- Bintoro, Tjokromidjojo, 2003, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Deddy S.B dan Riyadi, Dkk. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Gunawan, Sumodiningrat, 1997, *Menejemen Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bina Rene Periwara, Jakarta.
- Handayuningrat, Soewarno. 1990, *Pengantar Studi Administrasi Dan Menejemen*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Handoko T. Hani, 2003, *Menajemen*, BAFE, Edisi II, Yokyakarta.
- Juliansyah, Noor . 2011, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta.
- Lambang. 2007, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Manulang. 2001, *Menejemen Perusahaan dan Pemerintahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Michael, P Todaro. 2000, *Pembangunan Ekonomi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nugroho dan Dahuri. 2003. *Reinventing Pembangunan*, PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Riyadi, Bratakusumah D.S. 2005, *Perencanaan pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soetomo. 2009, *Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- S.P Siagian. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta
- _____. 1995, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.

- Sugiono. 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, ALFABETA, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007, *Menejemen Pemerintahan*, PT. PERCA, Jakarta.
- Thamrin, Husni. 2008, *Metodologi Penelitian*, Suska Press, Riau.
- Uno, Hamzah B. 2006, *Perencanaan Pembelajaran*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman, Husaini, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Referensi Lain:

Al-Qur'an

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004, *Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 03 Tahun 2011, *Tentang Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah*.